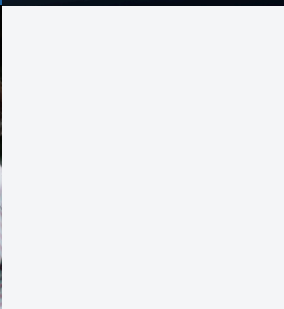
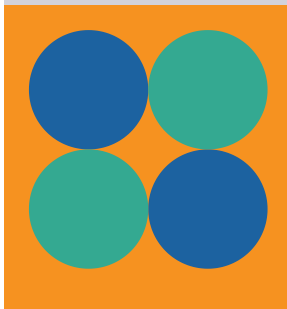
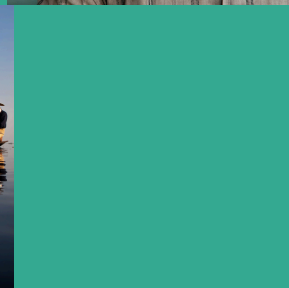
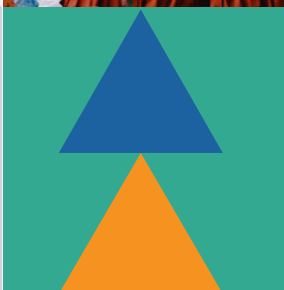
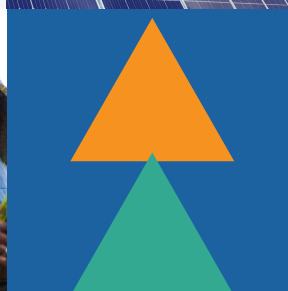


Laporan Tahunan 2023



Daftar Isi

Selayang Pandang

Tentang SMERU	3
Sambutan Pembina	4
Sambutan Manajemen	5
Yayasan SMERU	6

Momen Penting	8
---------------	---

SMERU dalam Angka	10
-------------------	----

Sorotan Penelitian

Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim	12
Perlindungan Sosial	14
Pendidikan	16
Ekonomi Digital & Kreatif	18
Anak, Remaja & Pemuda	20
Kesehatan	22

Wilayah Kerja SMERU	24
---------------------	----

Sorotan Kegiatan

Forum Pembangunan Daerah	29
Peluncuran Hasil Studi tentang Perlindungan Anak	30
SMERU Learning Centre	32

Sorotan Publikasi	34
-------------------	----

Keterlibatan dalam Proses Kebijakan	36
-------------------------------------	----

Jejaring	38
----------	----

Data dan Informasi	40
--------------------	----

Profil Staf	42
-------------	----

Struktur Organisasi	44
---------------------	----

Laporan Keuangan 2022 & 2023	45
------------------------------	----

Redaksi	48
---------	----



Laporan Tahunan 2023

The SMERU Research Institute

Laporan Tahunan 2023/SMERU, Editor: Alia An Nadhiva, Muhammad Gabriell Firdausy Erfan

--Jakarta: The SMERU Research Institute, 2025

--48 p; 27cm.

ISSN 9 772597 881003

1. Laporan

2. Research

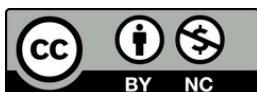
I. Judul

II. Author

001.4 --ddc 23

Diterbitkan oleh The SMERU Research Institute
Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330 Indonesia

Januari 2026



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah secara daring dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web smeru.or.id.



The SMERU Research Institute



@SMERUInstitute



@smeru.institute



Tentang SMERU



SMERU adalah sebuah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan. Ruang lingkup pekerjaan kami mencakup berbagai isu sosial-ekonomi, terutama yang berperspektif kemiskinan dan ketimpangan.

Kami memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman melakukan penelitian yang berfokus pada kemiskinan dan ketimpangan, perlindungan sosial, dan pembangunan manusia di Indonesia. Kami secara aktif berupaya mendorong kebijakan promasyarakat miskin di tingkat nasional dan daerah melalui bukti berbasis hasil penelitian. Kami menerapkan pendekatan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) pada seluruh pekerjaan kami.

Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia dan dunia yang terbebas dari berbagai bentuk kemiskinan dan ketimpangan melalui dukungan penelitian untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti



Foto: Mukti Mulyana

Misi

- Menghasilkan bukti melalui penelitian berkualitas untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor swasta, yang berperspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial terkait isu kemiskinan dan ketimpangan, perlindungan sosial, serta pembangunan manusia di tingkat nasional dan internasional
- Mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk mendorong perumusan kebijakan berbasis hasil penelitian
- Mengembangkan dan mendukung diskursus kebijakan pemerintah dan nonpemerintah, termasuk sektor swasta, yang berbasis hasil penelitian
- Memperkaya khazanah pengetahuan tentang kemiskinan dan ketimpangan, perlindungan sosial, serta pembangunan manusia



Sambutan Pembina

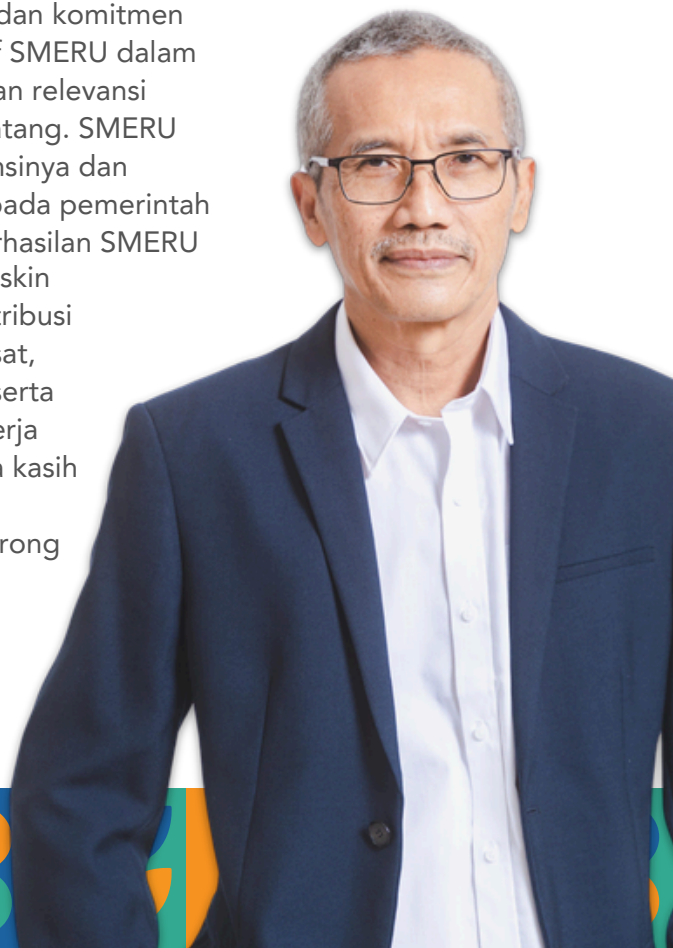
Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap penelitian di Indonesia berubah secara signifikan, baik dalam hal pendanaan maupun topik riset. Meskipun skema pendanaan terus berganti, SMERU menyesuaikan arah penelitian agar tetap relevan dengan kebutuhan pascapandemi, antara lain dengan melakukan penelitian yang memberikan solusi konkret terhadap permasalahan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang dihadapi masyarakat. Selain itu, meningkatnya urgensi isu lingkungan dan perubahan iklim mendorong SMERU untuk memperluas cakupan penelitian ke bidang ini agar dapat berkontribusi nyata dalam mendorong perumusan kebijakan berbasis penelitian di bidang ini.

SMERU juga terus berupaya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan dan ketimpangan yang membutuhkan keterlibatan serta dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat luas. Pada 2023, SMERU memperkuat kerja sama penelitian dengan lembaga internasional untuk saling berbagi sumber daya dan keahlian, salah satunya dengan bergabung dalam ASEAN+3 Finance Think-tank Network. SMERU juga mengembangkan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi staf pemerintah maupun nonpemerintah melalui SMERU Learning Centre. Pengembangan SMERU Learning Centre, yang dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan salah satu misi SMERU, dituangkan dalam amandemen Anggaran Dasar Yayasan SMERU yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembina Yayasan mengapresiasi segala upaya dan komitmen yang telah ditunjukkan tim manajemen dan staf SMERU dalam beradaptasi demi menjaga keberlangsungan dan relevansi SMERU, baik di masa kini maupun masa mendatang. SMERU harus terus berpegang teguh pada independensinya dan konsisten memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan SMERU dalam mendorong kebijakan pro-masyarakat miskin melalui bukti penelitian tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan lembaga donor, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang konsisten bekerja sama dengan kami. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam perjalanan SMERU mendorong kebijakan berbasis bukti hingga hari ini.

SUDARNO SUMARTO

Ketua



Sambutan Manajemen

Setelah lebih dari dua tahun melaksanakan kegiatan secara daring karena pandemi, sejak awal 2023 SMERU menerapkan pola kerja fleksibel. Kami tidak lagi mengharuskan semua staf bekerja dari kantor, tetapi tetap mengakomodasi kepentingan para mitra kami.

Sepanjang 2023, kami melaksanakan 36 studi di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan pemuda, kesejahteraan anak, dampak ekonomi pandemi, perlindungan sosial, digitalisasi, pengembangan penghidupan, dan pemberdayaan masyarakat. Kami juga memulai penelitian di isu lingkungan dan perubahan iklim dengan dua studi mengenai dampak polusi udara dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kedua studi diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian lingkungan dan perubahan iklim yang selama ini kurang menyoroti aspek kesejahteraan masyarakat, terutama terkait kepentingan kelompok miskin dan rentan.

Dalam memproduksi dan menyebarkan hasil-hasil penelitian, kami menggandeng mitra sektor swasta, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan lainnya. Beberapa seminar publik kami selenggarakan dengan dukungan lembaga bilateral dan multilateral, perusahaan swasta, lembaga filantropi, serta Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Kami berharap kolaborasi ini dapat berlanjut agar hasil penelitian kami makin bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tahun 2023 juga menjadi periode yang menantang dari sisi finansial karena perubahan pola pendanaan dari berbagai sumber pendanaan tradisional SMERU. Kami merespons dengan efisiensi, memperluas kerja sama, mencari sumber pendanaan baru, dan menginisiasi program pelatihan berbayar agar pengetahuan lembaga yang terkumpul selama lebih dari 20 tahun dapat terus dibagikan.

Keberhasilan kami dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut lahir dari kepercayaan dan dukungan semua mitra SMERU, serta komitmen dan kerja keras seluruh staf, Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan SMERU. Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan komitmen tersebut. Kami akan terus beradaptasi dan berkolaborasi untuk menghadirkan penelitian berbasis bukti demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan di Indonesia.

WIDJAJANTI ISDIJOSO

Direktur



Yayasan SMERU

Pembina



**Dr. Sudarno
Sumarto**

(Ketua)
The SMERU Research
Institute & Tim
Nasional Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K),
Jakarta



**Prof. Dr. Syarif
Hidayat**

(Wakil Ketua)
Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN),
Jakarta



Dr. Syaikhul Usman

(Anggota)
The SMERU Research
Institute, Jakarta



**Prof. Dr. Ir. Ruth
Stella Thei, MS.**

(Anggota)
Guru Besar Tetap
Fakultas Pertanian,
Universitas Mataram,
Lombok



**Nuning
Akhmadi, M.Sc.**

(Anggota)
The SMERU
Research Institute
(purnatugas), Tokyo



Pengawas



**Dr. Asep
Suryahadi**

(Ketua)
The SMERU Research
Institute, Jakarta



**Bambang
Soelaksono, M.M.**

(Anggota)
The SMERU Research
Institute (purnatugas), Jakarta

Pengurus



**Ir. Widjajanti
Isdijoso,
M.Ec.St.**

(Ketua)
The SMERU
Research
Institute, Jakarta



**Athia Yumna,
M.Sc.**

(Wakil Ketua)
The SMERU
Research
Institute, Jakarta



**Hesti Marsono,
M.Sc.**

(Bendahara)
The SMERU
Research
Institute, Jakarta



**Dr. Heni
Kurniasih**

(Sekretaris)
The SMERU
Research
Institute, Jakarta



Momen Penting 2023

JANUARI

- SMERU menerbitkan *Nawala SMERU* perdana, yaitu buletin elektronik berisi informasi ringkas dari penelitian, analisis para ahli, dan berita terbaru kegiatan SMERU. *Nawala SMERU* terbit setiap bulan dan disebarluaskan kepada berbagai pemangku kepentingan SMERU.
- Dua Peneliti Utama SMERU, Sudarno Sumarto dan Asep Suryahadi, masing-masing menduduki peringkat pertama dan kelima dalam daftar 25% Penulis Teratas di Indonesia versi IDEAS/RePEc. The SMERU Research Institute menempati peringkat ketiga dalam daftar 25% Institusi dan Ekonom Teratas di Indonesia.

FEBRUARI

- Dalam rangka ulang tahun ke-22 pada 1 Januari, SMERU membagikan video yang menyoroti kembali hasil-hasil penelitian yang berdampak pada penyusunan kebijakan dan pernah memancing diskusi publik. Dalam video tersebut, peneliti SMERU menceritakan proses di balik studi, mulai dari pembuatan desain penelitian hingga proses analisis.
- Program RISE di Indonesia dan Tanoto Foundation bekerja sama dengan Papan Tulis Education Podcast memproduksi seri sinar pendidikan "Learn and Unlearn" yang mengangkat cerita-cerita menarik dari berbagai elemen pendidikan.

MARET

- SMERU dan *Magdalene*, media yang berfokus pada isu perempuan, berdiskusi melalui Instagram Live dengan mengangkat tema "#MerekaJugaPekerja: Kenapa Penting Ngomongin Kerja-Kerja Perawatan." Peneliti SMERU, Nila Warda, memaparkan hasil studi tentang kerja pengasuhan dan perawatan tak berbayar di Indonesia bersama Pemimpin Redaksi *Magdalene*, Devi Asmarani.

DESEMBER

- Tanoto Foundation dan SMERU, di bawah arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyelenggarakan Forum Diskusi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar (FOKUS) yang mengidentifikasi berbagai upaya pemerintah maupun inisiatif pihak lain dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa.
- SMERU meluncurkan #ApaKataSMERU, yaitu ulasan peneliti SMERU tentang isu yang sedang ramai diperbincangkan publik, tetapi dari perspektif hasil penelitian yang relevan. #ApaKataSMERU edisi pertama mengulas visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
- Sekretaris Pertama Bagian Informasi dan Kebudayaan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Yuriko Kawakubo, mengunjungi SMERU dan berdiskusi dengan beberapa peneliti SMERU tentang persoalan pekerja anak di Indonesia saat ini, salah satunya terkait tingkat pendidikan mereka.

NOVEMBER

- Article 33 Indonesia bersama dengan SMERU, di bawah naungan forum Science Technology Innovation Policy Lecture (STIPL), menyelenggarakan diskusi sesi keempat STI Policy Lecture Series III 2023 yang bertema "Transformasi Pendidikan: Peran Platform Digital dalam Peningkatan Kualitas Ekosistem Pendidikan".
- Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Sekretariat Wakil Presiden, bekerja sama dengan SMERU, menyelenggarakan dialog kebijakan bertema perlindungan sosial adaptif (PSA) untuk orang asli Papua. Pembahasan berfokus pada hasil penelitian SMERU mengenai implementasi perlindungan sosial di Papua selama ini, serta rekomendasi terkait penerapan PSA ke depannya.

OKTOBER

- Direktur SMERU, Widjajanti Isdijoso, menandatangani Nota Kesepahaman ASEAN+3 Finance Think-tank Network (AFTN) secara virtual. SMERU menjadi salah satu dari 21 *think tank* di kawasan ASEAN yang bergabung dalam AFTN, sebuah platform untuk pertukaran pengetahuan antaranggotanya dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan regional melalui kerja sama penelitian.

APRIL

- Artikel Peneliti Junior SMERU, Hening Wikan, terpilih sebagai "The Most Read Policy Forum Pieces of 2022" oleh situs web *Asia & The Pacific Policy Society Policy Forum*. Wikan menyoroti pentingnya Pemerintah Indonesia untuk kembali meningkatkan komitmennya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim pascapandemi COVID-19.
- Heni Kurniasih, Sekretaris Lembaga SMERU, diundang oleh ASTA Research Center dan Universitas Antananarivo di Madagaskar untuk berdiskusi dengan akademisi dari universitas tersebut. Heni mempresentasikan tinjauan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan di Indonesia berdasarkan penelitian-penelitian SMERU.

MEI

- Asep Suryahadi, Peneliti Utama SMERU, menjadi salah satu panelis dalam acara peluncuran laporan "The Indonesian Poverty Assessment" yang diselenggarakan Bank Dunia. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Country Director Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen.

JUNI

- SMERU menyelenggarakan empat seminar Forum Kajian Pembangunan dengan tema pekerja ekonomi gig; kepemudaan; pendidikan; dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Seminar ini merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil penelitian sekaligus forum diskusi dalam rangka mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti di Indonesia.
- The Cambodia Development Resource Institute (CDRI), lembaga penelitian kebijakan dari Kamboja, mengundang SMERU untuk bergabung dalam kemitraan sebagai bagian dari program riset Thnal Odom Chomnes yang didukung oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). SMERU merupakan satu dari tiga lembaga penelitian di Indonesia yang bergabung dalam kemitraan ini.

SEPTEMBER

- Peneliti Senior SMERU, Ulfah Alifia, memaparkan temuan studi tentang pandemi COVID-19 dan perlindungan anak dalam diskusi yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Diskusi tersebut menghimpun masukan bagi Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 bidang Perlindungan Anak.
- Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Tengah mengunjungi SMERU di Jakarta dan mendiskusikan kolaborasi produk pengetahuan terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan dan isu perekonomian daerah.

AGUSTUS

- SMERU menyelenggarakan seminar publik dengan narasumber Samuel Bazzi, Profesor Ekonomi di University of California San Diego. Samuel membahas makalah terbarunya bersama Masyhur Hilmy (Boston University) dan Benjamin Marx (Boston University, CEPR) yang menganalisis bagaimana sekolah-sekolah Islam merespons kebijakan SD Inpres pada era 1970-an.
- SMERU melakukan pertemuan terbatas dengan Dewan Pertimbangan Presiden RI guna membahas kondisi *stunting* di Indonesia. SMERU menyampaikan tantangan dan rekomendasi kebijakan untuk pencegahan *stunting* yang disarikan dari studi-studi SMERU yang terkait *stunting*.
- SMERU menjadi tuan rumah acara diskusi antara delegasi ADB Board of Directors dengan lembaga *think tank* terpilih mengenai isu sosial-ekonomi dan transisi energi di Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Asep Suryahadi menyampaikan perkembangan situasi sosial-ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.

JULI

- SMERU dan Jaringan LSM untuk Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) menyelenggarakan diseminasi dan diskusi catatan kebijakan berjudul "Percepatan Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian." Diskusi ini bertujuan menjangkau masukan dari pemangku kebijakan terkait isu pekerja anak untuk memperkuat catatan kebijakan.
- Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Asian Development Bank Institute (ADBI) serta SMERU menyelenggarakan dialog kebijakan tingkat tinggi dengan tema "Indonesia's ASEAN Chairmanship 2023: Promoting ASEAN Relevance in Global Market".
- SMERU dan UNICEF Indonesia melaporkan delapan penelitian isu-isu spesifik terkait anak di Indonesia kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

SMERU dalam Angka

36

PENELITIAN

Tiga topik penelitian yang paling banyak dikerjakan SMERU tahun ini adalah pendidikan; anak, remaja, dan pemuda; dan lingkungan hidup dan perubahan iklim.

10

ACARA KOLABORASI

DENGAN LEMBAGA LAIN

SMERU menggelar acara kolaborasi dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya kementerian, pemerintah daerah, perusahaan swasta, organisasi filantropi, dan lembaga penelitian lain.

38

PUBLIKASI DAN ARTIKEL

Tahun ini SMERU menerbitkan 14 publikasi. Selain itu, peneliti SMERU menulis 15 artikel yang diterbitkan di media massa dan 9 artikel di jurnal akademik.

PESERTA PELATIHAN

242

SMERU LEARNING CENTRE

Sebanyak 164 orang mengikuti *Regular Training* dan 78 orang mengikuti *Customized Training*.

13

VIDEO DIPRODUKSI

Video berdurasi durasi 2–10 menit paling banyak ditonton dengan capaian 19.600 ribu views.

6.490

KENAIKAN FOLLOWERS

SEMUA MEDIA SOSIAL SMERU

Dari semua media sosial SMERU, akun Instagram SMERU mendapat tambahan *followers* terbanyak dengan 3.198 *followers* baru.





SOROTAN PENELITIAN

Tahun ini, SMERU mengerjakan 36 proyek penelitian tentang berbagai isu pembangunan. Untuk pertama kalinya pula pada tahun ini, SMERU meneliti isu lingkungan dan perubahan iklim dengan tetap berfokus pada aspek kesejahteraan masyarakat.

Foto: Muhammad Aazzam (Unsplash)

Sorotan Penelitian

Meningkatkan Kesadaran Kolektif untuk Melawan Polusi Udara dan Menjaga Kelestarian Kawasan Konservasi Perairan

Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat polusi udara paling tinggi di dunia. | Foto: M. Harits Kamaaluddin

Sebagai wujud komitmen untuk memberikan masukan terhadap kebijakan lingkungan, khususnya dari perspektif penurunan kemiskinan dan ketimpangan, SMERU melaksanakan dua studi terkait lingkungan pada 2023. Studi pertama berkenaan dengan polusi udara, sementara yang kedua terkait kawasan konservasi perairan (KKP). Meski fokus isunya berbeda, kedua studi menunjukkan terbatasnya kesadaran berbagai pihak untuk mengintegrasikan isu lingkungan dengan aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Studi mengenai polusi udara dilakukan di Jakarta yang penduduknya berisiko kehilangan 2,4 tahun angka harapan hidup akibat paparan polusi udara

berkepanjangan. Studi yang dilakukan SMERU dan University of Chicago ini menguji keefektifan kampanye berbasis informasi berdasarkan pengalaman 83 orang tua terpilih.

Hasilnya menunjukkan bahwa kampanye dapat meningkatkan upaya melindungi diri dari dampak buruk polusi udara. Dibandingkan dengan data awal (*baseline*) Juni 2023, lebih dari separuh rumah tangga mengurangi aktivitas di luar dan membatasi anaknya keluar rumah pada September 2023. Sebagian rumah tangga juga telah menggunakan masker ketika mengendarai sepeda motor. Selain itu, persentase rumah tangga yang mengecek tingkat polusi udara meningkat dari 9% menjadi 39%.



Namun, masih ada kesenjangan pengetahuan responden mengenai polusi udara. Pasalnya, pengukuran menggunakan sensor dalam ruangan menunjukkan bahwa kualitas udara di dalam ruangan sering kali setara dengan di luar ruangan sehingga penggunaan masker ketika mengendarai sepeda motor saja tidak cukup untuk melindungi mereka dari polusi udara.

Sementara itu, studi mengenai KKP yang dilakukan atas dukungan Agence Française De Développement (AFD) menyoroti pengelolaan KKP dalam kaitannya dengan upaya penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat di kawasan-kawasan tersebut. Selain menganalisis dan membandingkan data sekunder terkait berbagai dimensi kemiskinan dan ketimpangan antara wilayah konservasi dan nonkonservasi, dilakukan studi kasus di tiga KKP di Indonesia, yaitu Nusa Penida, Sabu Raijua, dan Minahasa Utara.

Hasil studi memperlihatkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar KKP relatif tertinggal dalam hal ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar, lebih miskin, dan memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Kondisi ini setidaknya dipengaruhi tiga faktor:

- a) pengelolaan KKP yang bersifat sentralistik dan lebih berfokus pada perluasan kawasan;
- b) aspek kesejahteraan masyarakat belum diarusutamakan dalam setiap tahapan pengelolaan KKP yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan
- c) partisipasi substansial masyarakat dalam pengelolaan KKP yang masih rendah.



Potensi kelautan Indonesia sangat besar, tetapi ironisnya banyak masyarakat pesisir masih hidup dalam kemiskinan. | Foto: SMERU

Berbagai hal tersebut mengindikasikan masih terbatasnya pemahaman, kesadaran, dan kapabilitas para pengelola KKP terkait aspek kesejahteraan masyarakat.

Kedua studi menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menyelaraskan isu lingkungan dengan aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah perlu menyediakan informasi yang komprehensif dan sistematis tentang bahaya dan dampak polusi udara agar seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan pencegahan keterpaparan secara lebih ketat. Sementara itu, terkait pengelolaan KKP, pemerintah perlu mengarusutamakan penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan dalam setiap tahap pengelolaannya. Kesadaran dan kapasitas para pengelola untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya penduduk miskin, juga harus ditingkatkan. ■





Sorotan Penelitian

Memperkuat Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun Ketangguhan Orang Asli Papua

Kesenjangan pembangunan di Papua membuat orang asli Papua makin tertinggal dan rentan terhadap berbagai guncangan, termasuk konflik bersenjata. | Foto: Jefri

Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua mengamankan kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua (OAP). Namun, ketimpangan antara OAP dan warga non-OAP pada berbagai dimensi masih tampak nyata. Papua masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan tingkat pembangunan manusia terendah di Indonesia. Situasi tersebut diperburuk dengan kehadiran guncangan kovariat (guncangan berskala luas yang berdampak pada sekelompok orang sekaligus) akibat pandemi COVID-19 dan konflik berkepanjangan, yang menjadikan OAP sangat rentan.

Dengan kompleksitas ini, kehadiran perlindungan sosial seharusnya dapat menjadi bantalan serta penguat bagi OAP untuk membangun ketangguhan agar tidak semakin jatuh dalam kemiskinan dan perangkat kerentanan.

Pada akhir 2022, SMERU, dengan dukungan Kurawal Foundation, melakukan studi untuk mengidentifikasi celah dalam perlindungan sosial untuk menjawab kebutuhan OAP. Studi ini menemukan bahwa sistem perlindungan sosial yang ada belum mampu membangun ketangguhan OAP dalam jangka panjang. Sebagian besar skema



perlindungan sosial di Papua bersifat protektif dalam bentuk bantuan sosial dan preventif melalui jaminan sosial—yang cakupannya jauh lebih rendah daripada rata-rata provinsi lain di Indonesia.

Sementara itu, skema promotif yang dilaksanakan Pemerintah Pusat belum mampu menumbuhkan pendapatan OAP yang stabil. Kerentanan OAP memburuk ketika terjadi konflik bersenjata yang memaksa mereka mengungsi ke wilayah lain. Gabungan antara berbagai faktor tersebut menyebabkan OAP termarginalkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Transformasi Jangka Panjang untuk Ketangguhan dan Kesejahteraan OAP

Membangun ketangguhan OAP memerlukan pendekatan komprehensif dengan menerapkan semua aspek perlindungan sosial adaptif (PSA). Kerangka PSA menekankan pentingnya mengembangkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam dua hal: merespons guncangan dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman masa depan. Tujuannya adalah mencegah mereka terpuruk ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.

Pengembangan penghidupan OAP membutuhkan lebih dari sekadar pemberdayaan ekonomi. Diperlukan juga pendekatan transformatif yang mampu mengatasi akar masalah dan membawa perubahan jangka panjang. Studi ini mengidentifikasi beberapa prinsip penting yang harus diterapkan:

- a) Pencapaian bertahap, yaitu fokus pada kemajuan inkremental yang

disesuaikan dengan tahap perkembangan masyarakat, bukan sekadar percepatan.

- b) Bertumpu pada komune dan hubungan kekerabatan.
- c) Pengelolaan potensi lokal dengan menggunakan teknologi tepat guna.

Konteks Papua membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dengan daerah lain. Penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih, harus dipercepat hingga ke tingkat kampung. Namun, pengembangan penghidupan sebaiknya dilakukan secara inkremental, mengikuti kesiapan dan kebutuhan OAP di tiap-tiap komune.

Untuk merespons kebutuhan pengungsi korban konflik, pemerintah perlu memodifikasi program perlindungan sosial yang sudah ada. Berikut tiga modifikasi utama yang diperlukan:

- a) Memastikan pengungsi dapat tetap mengakses Jaminan Kesehatan Nasional di mana pun mereka berada, tidak terbatas wilayah domisili.
- b) Meningkatkan besaran bantuan pangan nontunai dan mekanisme distribusinya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan pengungsi.
- c) Memastikan rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan dan bantuan sosial lainnya tetap mendapat haknya selama di pengungsian.

Selain itu, mengingat pengembangan penghidupan pengungsi paling efektif dilakukan di daerah asal, pemerintah perlu memastikan keamanan agar mereka dapat pulang dengan sukarela. ■



Sorotan Penelitian

Mengkaji Potensi Pembelajaran Aktif dan Inovatif serta Pemanfaatan Teknologi untuk Pembelajaran



Program Matematika Menyenangkan, Sesuai Jenjang, dan Interaktif (MENGEJAR) terlaksana berkat kolaborasi banyak pihak, termasuk pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta. | Foto: M. Harits Kamaaluddin

SMERU berkomitmen untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti melalui kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah (pemda), maupun lembaga nonpemerintah. Sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi sistem pendidikan di Indonesia, SMERU telah menjalin dua bentuk kolaborasi, yakni dalam rangka mengevaluasi dampak Program Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran (PINTAR) serta merancang dan melaksanakan program rintisan Matematika Menyenangkan, Sesuai Jenjang, dan Interaktif (MENGEJAR).

Program PINTAR yang diprakarsai Tanoto Foundation di Kabupaten Paser,

Kalimantan Timur, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para kepala sekolah dan guru. Materinya mencakup praktik pedagogi, kepemimpinan, dan manajemen sekolah, serta bertujuan meningkatkan kapasitas pemda, khususnya Dinas Pendidikan. Setelah tiga tahun pelaksanaan intervensi, studi kami menemukan bahwa nilai capaian belajar siswa sekolah mitra secara signifikan lebih tinggi daripada siswa sekolah tanpa intervensi—sebesar 38,8% pada sekolah dasar (SD) mitra dan 10% pada sekolah menengah pertama (SMP) mitra.

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi capaian belajar siswa, antara lain, metode pembelajaran aktif dan inovatif, manajemen sekolah,



program literasi dan optimalisasi perpustakaan, pelatihan guru, ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran, dan keterlibatan orang tua. Selain itu, penyediaan anggaran untuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi terbukti memengaruhi capaian belajar secara signifikan, terutama pada tingkat SD. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi dari penelitian ini adalah peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Pada 2022–2023, SMERU juga terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program rintisan MENGEJAR, yang bertujuan melihat sejauh mana pemanfaatan teknologi serta penerapan metode pembelajaran aktif dan inovatif berdampak terhadap capaian belajar siswa. Program MENGEJAR merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Asian Development Bank Institute (ADBI), didukung oleh Tanoto Foundation, Surala Suluh Karsa, Mentari Teachers Academy, dan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Asia Tenggara (J-PAL SEA)-Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Program ini mencakup pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi guru matematika tingkat SMP melalui pendekatan *high touch* (pembelajaran yang interaktif dan berorientasi pada *higher-order thinking skills*) dan *high tech* (penggunaan *e-learning* dalam pembelajaran).

Dalam pelaksanaannya, SMERU bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan *rapid cycle evaluation* (RCE) melalui uji coba modul *high touch* dan *high tech* serta rancangan pelatihan pada beberapa sekolah. Proses RCE meliputi penyempurnaan modul, diikuti dengan uji coba kembali pada sekolah-sekolah lain sebelum modul difinalisasi. Setelah itu, SMERU, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat, memimpin implementasi program MENGEJAR yang melibatkan 200 guru matematika dari 100 SMP negeri di Provinsi DKI Jakarta, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Kendal. Pada tahap ini, SMERU bertanggung jawab memastikan kelancaran seluruh rangkaian pelatihan, melakukan pemantauan dengan mengunjungi sekolah dan Dinas Pendidikan, mengobservasi intervensi *high touch*, melakukan pendampingan, serta memberikan pelatihan penyegaran. Untuk mengetahui dampak program MENGEJAR, SMERU juga terlibat dalam pengumpulan data *baseline* dan *endline*, sementara analisis dampaknya dikerjakan oleh ADBI. ■



Bantuan teknologi dapat membantu mengembangkan keterampilan dasar siswa. | Foto: Mukti Mulyana



Sorotan Penelitian

Menelaah Lanskap Ekosistem Digital Indonesia: Tantangan dan Peluang

Program-program pemerintah turut mendorong kewirausahaan pemuda dan digitalisasi, yang menjadi kunci tumbuhnya ekosistem perusahaan rintisan *agritech* di Indonesia. | Foto: Mukti Mulyana

Pada 2023, kami melaksanakan dua studi tentang ekosistem digital. Studi pertama meneliti interaksi antara berbagai faktor dan aktor yang memengaruhi kewirausahaan teknologi pertanian (*agritech*) di kalangan pemuda. Kami menemukan bahwa selama satu dekade terakhir, berbagai program pemerintah yang bertujuan mendorong kewirausahaan pemuda dan digitalisasi melalui pemberian hibah maupun bentuk dukungan yang lain menjadi kunci utama dalam pertumbuhan ekosistem perusahaan rintisan (*startup*) *agritech*. Selain itu, pemangku kepentingan lain seperti inkubator universitas, sektor swasta, media teknologi, serta komunitas akar rumput turut memegang peranan penting dalam membentuk lanskap *agritech*.

Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya

- a) perusahaan rintisan *agritech* anak muda masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta;
- b) stigma negatif terhadap pertanian sebagai sektor berpenghasilan rendah;
- c) rendahnya adopsi digital oleh petani;
- d) kerumitan proses bisnis dan perizinan yang mempersulit perusahaan *agritech*, terutama pada masa *tech winter* ketika pendanaan investor terbatas; dan
- e) dominasi laki-laki dalam sektor *agritech*.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan afirmatif nyata untuk mendorong partisipasi aktif perempuan muda dan penyandang disabilitas dalam ekosistem *agritech*.



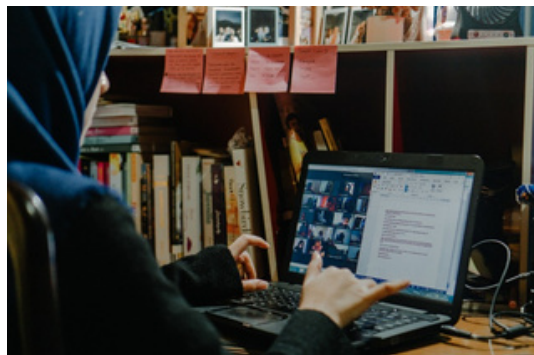
Kerja sama lintas kementerian, pemda, dan inkubator universitas penting untuk mendukung kewirausahaan pemuda. Lima isu kunci yang harus ditangani yaitu:

- mengatasi kesenjangan infrastruktur di perdesaan dan luar Pulau Jawa;
- memperbaiki citra pertanian dengan mempromosikan kisah sukses pengusaha muda di media sosial;
- mengoptimalkan peran penyuluh dalam memperkenalkan teknologi kepada petani;
- merampingkan regulasi, perizinan, serta pematenan untuk mendorong inovasi *agritech*; dan
- mengarusutamakan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di semua program terkait, termasuk menghilangkan stigma pertanian sebagai sektor laki-laki.

Studi kami yang kedua melihat dampak berbagai peraturan perundang-undangan tentang internet dan pers di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Penelitian ini mengungkap tiga temuan utama:

- Regulasi yang bersifat membatasi yang mengancam kebebasan pers di media digital
- Kurangnya kajian mengenai pemahaman dan sikap pekerja media terhadap isu privasi dalam kerangka UU PDP
- Ketimpangan gender dalam industri media, mencakup pemberitaan yang tidak sensitif gender dan kekerasan berbasis gender

Studi ini juga menelaah Program Nasional Literasi Digital Indonesia “Indonesia Makin Cakap Digital” dari Kementerian



Sikap pekerja media terhadap isu privasi belum banyak diteliti. | Foto: M. Harits Kamaaluddin

Komunikasi dan Informatika yang bertumpu pada empat pilar: keahlian, keamanan, budaya, dan etika. Meski didukung pendanaan besar dan bermitra dengan Siberkreasi, sebuah gerakan nasional di bidang literasi digital, program ini belum memiliki alat ukur efektivitas yang memadai dan tidak responsif gender.

Berdasarkan temuan studi ini, kami mengusulkan empat rekomendasi utama:

- Melakukan kajian menyeluruh terhadap peraturan undang-undang media, terutama UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU PDP, guna menyeimbangkan kebebasan jurnalistik dengan tantangan kontemporer seperti perlindungan privasi dan pelecehan daring.
- Memperluas inisiatif penelitian guna mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak UU PDP terhadap industri media.
- Menegakkan kebijakan yang responsif gender di seluruh sektor media.
- Menyempurnakan metrik dampak dan komponen sensitivitas gender dalam program “Indonesia Makin Cakap Digital”. ■





Sorotan Penelitian

Meningkatkan Kesejahteraan Anak dan Pemenuhan Hak Mereka melalui Penelitian

Deprivasi multidimensi dialami anak dari berbagai lapisan ekonomi, bukan hanya yang hidup dalam kemiskinan. | Foto: M. Harits Kamaaluddin

Sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990, upaya Indonesia untuk memenuhi hak-hak anak masih menghadapi tantangan serius. Pada 2022–2023, SMERU, dengan dukungan UNICEF Indonesia, melakukan delapan penelitian tentang anak dan menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Tiga topik utama yang dikaji meliputi kesejahteraan anak, gambaran anak dengan disabilitas, dan perkembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada anak. Ketiganya dibingkai dalam konteks pandemi COVID-19.

Hasil penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan kemunduran pada indikator capaian TPB terkait kemiskinan anak dan pekerja anak. Namun, dampaknya bervariasi antarwilayah serta di antara anak-anak dengan karakteristik individu dan rumah tangga yang berbeda. Tren tingkat kemiskinan anak menurun dari tahun ke tahun, tetapi kembali meningkat pada 2020 dan 2021 akibat pandemi. Meskipun terdapat penurunan tren tingkat kemiskinan anak, penurunannya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok dewasa dan lansia.



Analisis situasi kesejahteraan anak multidimensi juga menunjukkan bahwa anak dari semua kelompok pengeluaran, tidak hanya dari keluarga miskin, mengalami deprivasi multidimensi. Akan tetapi, persentasenya lebih besar pada anak di rumah tangga termiskin, dan lebih tinggi di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Dari segi aspirasi, anak-anak menilai pentingnya kesejahteraan psikologis, seperti sekolah bebas perundungan, waktu luang dengan orang tua dan teman sebaya, serta ketersediaan ruang publik ramah anak.

Tingkat deprivasi pada anak dengan disabilitas juga lebih tinggi daripada anak tanpa disabilitas. Anak dengan disabilitas menanggung beban berlapis akibat minimnya dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun regulasi dan aturan hukum untuk melindungi hak-hak mereka telah ada, implementasinya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi dan ketimpangan pemahaman di kalangan pemerintah.

Mendengarkan perspektif anak sangat krusial untuk merumuskan strategi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tepat sasaran, terutama ketika terjadi guncangan. Untuk itu, pemerintah perlu mengintensifkan upaya penjangkaran aspirasi anak, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan, sebagai landasan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Peningkatan efektivitas program kesejahteraan anak memerlukan

pendekatan komprehensif yang mencakup tiga langkah strategis:

- a) Membangun basis data penelitian berkualitas
- b) Memperbaiki mekanisme koordinasi guna meningkatkan kepedulian terhadap isu anak
- c) Mengembangkan penargetan program dan layanan yang lebih spesifik dan inklusif, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, seperti anak dengan disabilitas

8 Topik Penelitian SMERU dengan Kerangka yang Berpusat pada Anak

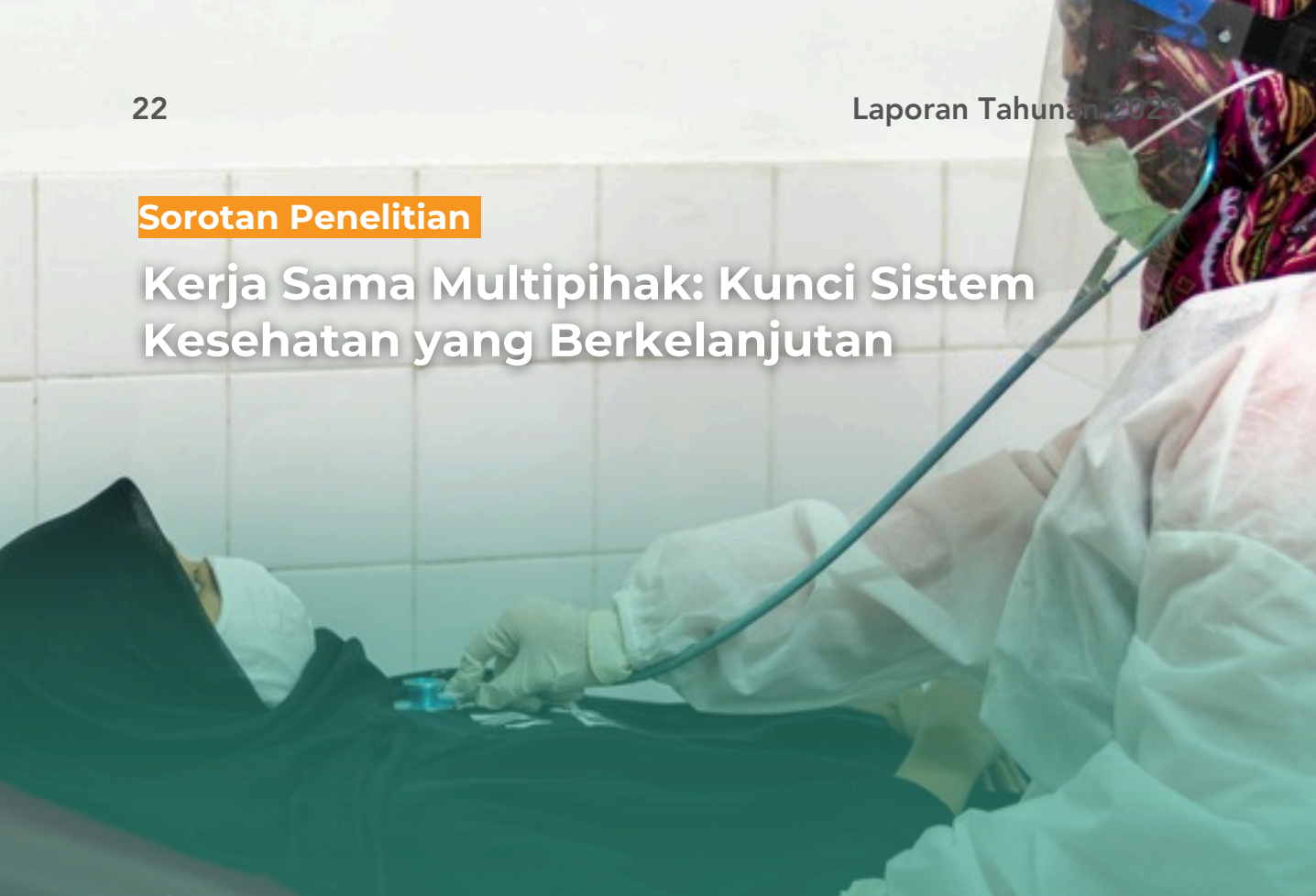
Kedelapan penelitian ini melibatkan anak secara langsung sebagai partisipan penelitian.

1. Analisis Kemiskinan Anak Moneter dan Analisis Deprivasi Hak Anak Multidimensi
2. Analisis Kesenjangan Kehidupan Anak Berbasis Kewilayahan dari Perspektif Anak
3. Indeks Kesejahteraan Holistik Anak
4. Dialog Kebijakan tentang Kesejahteraan Subjektif Anak di Jawa Barat
5. Pandangan dan Pengalaman Anak Selama Pandemi COVID-19
6. Dampak Pandemi COVID-19 pada Kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait Anak
7. Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 terhadap Rumah Tangga dan Kelompok Rentan di Indonesia
8. Analisis Lanskap Anak dengan Disabilitas di Indonesia ■



Sorotan Penelitian

Kerja Sama Multipihak: Kunci Sistem Kesehatan yang Berkelanjutan



Krisis kesehatan yang meluas menuntut respons bersama dari berbagai pihak. Hanya dengan kolaborasi, dampaknya dapat diminimalisasi dan pemulihan dapat berjalan lebih cepat. | Foto: Mukti Mulyana

Permasalahan pada saat krisis, meskipun merugikan, dapat memberikan pembelajaran yang memicu pembenahan atau perbaikan tata kelola. Dua studi SMERU tentang tata kelola di bidang kesehatan mengungkapkan pentingnya kolaborasi multipihak dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia.

Studi pertama menarik pelajaran dari respons terhadap pandemi COVID-19, sebuah krisis yang tidak hanya merenggut ribuan nyawa dari jutaan orang yang terinfeksi, tetapi juga mengharuskan pembatasan pergerakan yang memicu krisis ekonomi.

Studi yang didukung Bank Dunia ini menemukan bahwa kolaborasi pentaheliks menjadi salah satu kunci dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Kolaborasi yang dikoordinasi oleh pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 berhasil menyatukan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, komunitas, media, akademisi, sektor swasta, serta mitra internasional. Kolaborasi dilaksanakan pada tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan efektivitas intervensi komunikasi risiko kesehatan serta peningkatan akses vaksinasi dan tes COVID-19.



Bentuk kolaborasi yang dilakukan di antaranya sebagai berikut:

- a) Diseminasi pesan kesehatan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama melalui berbagai media milik pemerintah dan swasta, serta kegiatan di masyarakat berdasarkan materi yang disediakan oleh Satgas COVID-19
- b) Penyediaan vaksin dan alat tes COVID-19 oleh berbagai pihak yang kemudian disalurkan melalui tenaga kesehatan (nakes), diikuti penyebaran informasi kepada publik, serta pengorganisasian kegiatan vaksinasi oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat
- c) Pelacakan kontak (*tracing*) dalam rangka pengidentifikasian sasaran tes COVID-19 oleh tim gabungan nakes dan nonnakes

Setiap pemangku kepentingan yang memiliki sumber daya berbeda saling melengkapi sehingga menciptakan kolaborasi respons yang positif dalam penanganan pandemi COVID-19.

Walaupun demikian, kolaborasi tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan terkait kewenangan, pola komunikasi, dan koordinasi antarlembaga maupun antarlapisan pemerintahan. Ketidakjelasan relasi kewenangan, misalnya, berdampak pada lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan bervariasinya data kasus COVID-19 dan ketakselarasan pendapat antaraktor pemerintah terkait pembatasan sosial.

Studi kedua, yang dilakukan pada 2023 dengan dukungan World Health Organization, menelusuri dinamika ekonomi-politik di balik reformasi pembiayaan kesehatan, yaitu terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014. Studi ini menemukan bahwa keterlibatan berbagai pihak telah menjadi tuas pendorong keberhasilan reformasi yang dilakukan pascakrisis keuangan Asia pada 1997–1998.

Krisis tersebut secara tidak langsung menurunkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akibat penurunan pendapatan dan tidak adanya sistem jaminan sosial yang komprehensif. Hal ini menyadarkan pemerintah akan pentingnya menyediakan sistem jaminan sosial, termasuk asuransi kesehatan, bagi seluruh masyarakat.

Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, akademisi hingga lembaga nonpemerintah, berkolaborasi secara strategis membentuk tim perubahan untuk mereformasi sistem jaminan sosial di bidang kesehatan. Dalam implementasinya, proses reformasi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan politik, krisis ekonomi, dan ego sektoral. Namun, kolaborasi tim perubahan dan advokasi yang konsisten berhasil mendorong terealisasinya JKN pada 2014. ■



Wilayah Kerja SMERU



Kegiatan Penelitian dengan Cakupan Nasional

 Kegiatan Penelitian

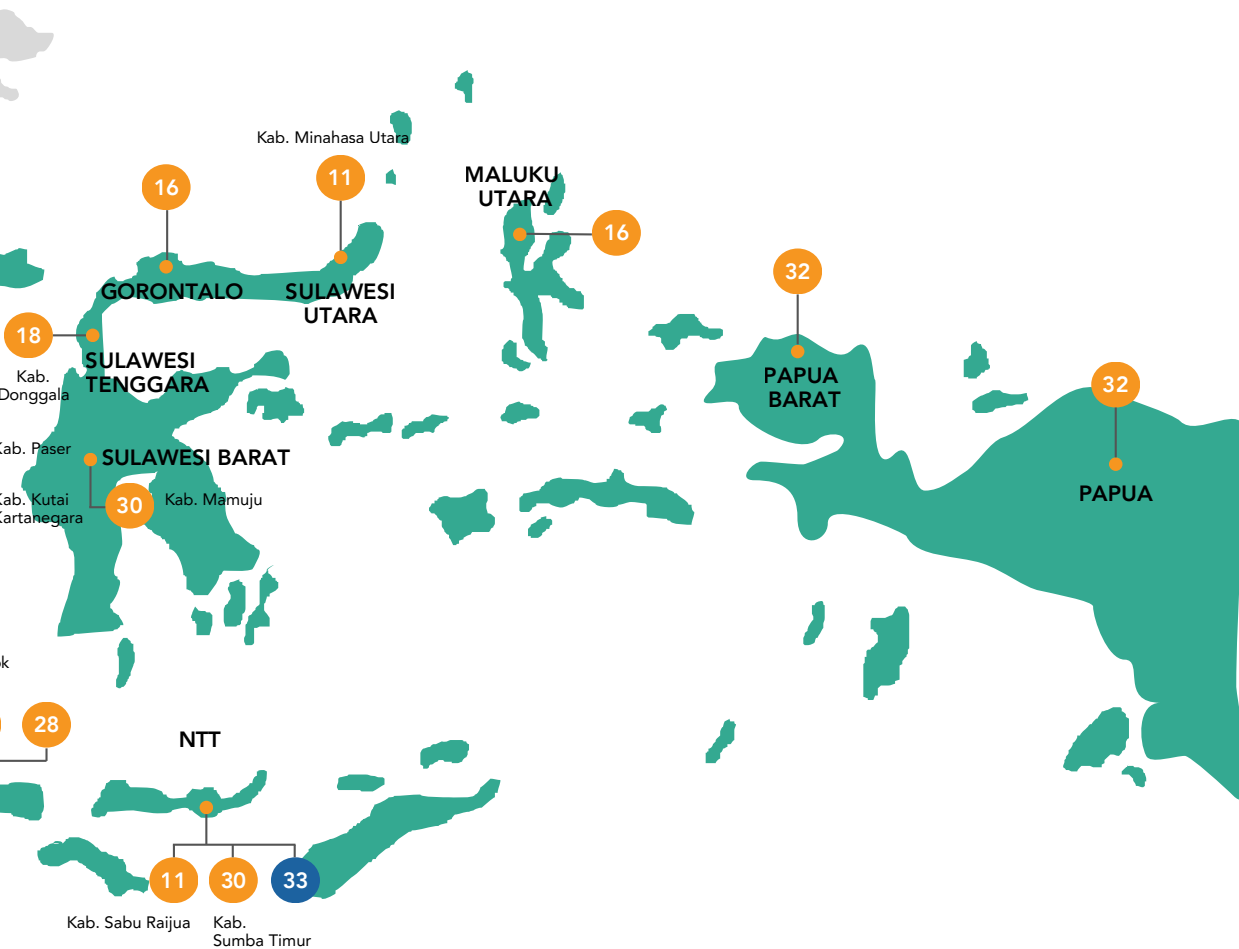
 Kegiatan di Tingkat Daerah

 Kegiatan Nonpenelitian

 Kegiatan di Tingkat Nasional

1	2	3	4	5
8	9	12	13	14
15	21	22	23	24
25	31			





Kegiatan Nonpenelitian dengan Cakupan Nasional



Legenda Wilayah Kerja SMERU

Kegiatan Penelitian

Anak, Remaja, dan Pemuda

- 1 *Development of the Background Study on Youth Development for the 2025–2029 RPJMN and 2025–2045 RPJPN* (Kajian Pendahuluan Pembangunan Pemuda untuk RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045)
- 2 Penulisan Laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2022
- 3 *Revisiting Youth Development Index* (Peningkatan Kembali Indeks Pembangunan Pemuda)
- 4 Penyusunan *Policy Brief* Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian
- 5 *Technical Assistance in the Implementation of Research Agenda for Children* (Dukungan Teknis dalam Implementasi Agenda Penelitian untuk Anak-Anak)
- 6 *Evaluation of Youth Civic Engagement Initiative-BASAbali* (Evaluasi BASAbali terhadap Partisipasi Sipil Pemuda)

Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

- 7 *Air Quality Index Indonesia* (Indeks Kualitas Udara Indonesia)
- 8 *Collaborative Research - Environment Climate Change Grant Pilot Round* (Riset Kolaboratif - Hibah Percontohan Lingkungan dan Perubahan Iklim)
- 9 Meningkatkan Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi yang Berkeadilan di Indonesia
- 10 *Protecting Children against Air Pollution: Educating at Home and School* (Melindungi Anak dari Polusi Udara: Program Sosialisasi di Rumah dan di Sekolah)

Kemiskinan dan Ketimpangan

- 11 *Harnessing Inequalities Reductions Benefits in Marine Protected Areas* (Mendorong Pengurangan Ketimpangan di Kawasan Konservasi Perairan)

Kebijakan Ekonomi

- 12 Evaluasi Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Kementerian Ketenagakerjaan
- 13 Penyusunan Kajian “*Structural Reform and an Enabling Environment for Inclusive, Resilient, and Sustainable Businesses*” (Reformasi Struktural dan Penciptaan Lingkungan yang Mendukung bagi Dunia Usaha yang Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan) dalam Kerangka Kerja Sama APEC”
- 14 *Scarring Effect on Firms* (Efek Jangka Panjang terhadap Usaha)

Kesehatan

- 15 *Health Financing Governance and Reforms in Indonesia: Analysis of Political Economy Dynamics* (Tata Kelola dan Reformasi Pembiayaan Kesehatan di Indonesia: Analisis Dinamika Ekonomi Politik)
- 16 *Documenting Lessons from Indonesia’s Public Health Response to COVID-19* (Mendokumentasikan Pelajaran dari Tanggap Kesehatan Masyarakat di Indonesia terhadap COVID-19)

Pengembangan Penghidupan dan Pembangunan Masyarakat

- 17 *Baseline Assessment: The Socioeconomic Condition of the Communities around the Mining Area in Kabupaten Sumbawa Barat* (Asesmen Pendahuluan: Kondisi Sosioekonomi Komunitas Lingkar Tambang di Kabupaten Sumbawa Barat)



- 18 Studi Pemetaan Kebutuhan Pendamping Pembangunan pada Tim Koordinasi Sistem Penguatan Pendampingan Pembangunan (TKSP3)

- 19 Pengembangan Model Kuantitatif Pemetaan Kebutuhan Pendamping Pembangunan

- 20 Pengukuran Dampak Program CSR BCA 2022

Tata Kelola, Kelembagaan, dan Desentralisasi

- 21 *Accelerating Digital Skills in Indonesia* (Akselerasi Keterampilan Digital di Indonesia)

Pendidikan

- 22 *Optimizing Learning Assessment: Research on Challenges and Opportunities for Education Quality Improvement in Religious, Nonreligious, Formal and Nonformal Education Institutions in Indonesia* (Optimalisasi Asesmen Pembelajaran: Kajian tentang Tantangan dan Peluang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Nonkeagamaan, Formal, dan Nonformal di Indonesia)

- 23 *To Support an Impact Evaluation Design and Conduct a Baseline School Survey for the High-Touch-High-Tech Pilot in Junior Secondary Schools in Indonesia (the "Project")* (Mendukung Perancangan Evaluasi Dampak dan Melakukan Survei Baseline Sekolah untuk Pilot Intervensi High-Touch High-Tech di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia)

- 24 *Research Consultancy for Implementing the High-Touch High Tech Interventions in Junior Secondary Schools in Indonesia* (Konsultasi Penelitian untuk Penerapan Intervensi High-Touch High-Tech di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia)

- 25 Pengukuran Dampak Program Tanoto Foundation Indonesia

- 26 Pengukuran Dampak Program PINTAR di Wilayah Dampingan Tanoto Foundation Indonesia

Perlindungan Sosial

- 27 Pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahap III

- 28 *HEAL: Promote Human Rights and Equality to Achieve Sustainability in West Nusa Tenggara and East Java, Indonesia* (Mendorong Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Kesenjangan untuk Mencapai Keberlanjutan di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur, Indonesia)

- 29 *Study on Elderly Grant Programs Part 3* (Studi Program Hibah Lansia Bagian 3)

- 30 *Protecting the Most Vulnerable in Rural Indonesia: How Can We Develop More Adaptive Social Protection* (Melindungi Kelompok Paling Rentan di Perdesaan Indonesia: Bagaimana Kita Dapat Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Lebih Adaptif)

- 31 Studi Evaluasi Penerima Kartu Prakerja Tahun 2022

- 32 *Strengthening Social Protection Infrastructure for Communities at Risk in Indonesia after COVID-19: A Systematic Review on Papua* (Memperkuat Infrastruktur Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan di Indonesia setelah Pandemi COVID-19: Kajian Sistematis tentang Papua)

Kegiatan Nonpenelitian

Kemiskinan dan Ketimpangan

- 33 Forum Pembangunan Daerah 2023

Pendidikan

- 34 *Capacity Building for Mitra Pendidikan Indonesia* (Peningkatan Kapasitas untuk Mitra Pendidikan Indonesia)



SOROTAN KEGIATAN

SMERU mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti melalui penelitian berkualitas serta forum-forum dialog bersama para pemangku kepentingan. Kolaborasi yang erat menjadi kunci untuk memperluas jangkauan sekaligus memperkuat dampak perbaikan kebijakan.



Foto: M. Harits Kamaaluddin

Sorotan Kegiatan

Forum Pembangunan Daerah 2023

Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan di Nusa Tenggara Timur

Kolaborasi yang solid antara pemangku kepentingan menjadi kunci bagi percepatan pengentasan kemiskinan di NTT. | Foto: M. Harits Kamaaluddin

Tahun ini, SMERU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Forum Pembangunan Daerah (FPD) yang bertema “Mendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan serta Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Acara bertempat di Aula Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 27 September 2023. Selain dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas Damianus Lana, S.H., M.Si., forum ini juga dihadiri pejabat pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT, akademisi, serta perwakilan lembaga organisasi nonpemerintah.

FPD ini membahas tiga topik utama, yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan ekonomi inklusif, dan pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. SMERU menekankan pentingnya memfokuskan pembangunan SDM di NTT pada anak dan pemuda. Hasil diskusi juga menggarisbawahi perlunya solusi untuk biaya adat yang tinggi, penguatan semangat membangun komunitas, perbaikan sanitasi dan kualitas

pendidikan, serta peningkatan anggaran daerah untuk kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif di NTT, perlu dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, infrastruktur, akses pasar, hilirisasi, pengelolaan sumber daya alam, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Di sisi lain, pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan optimasi potensi wisata, pemberdayaan masyarakat, pelatihan pelestarian lingkungan, serta perbaikan regulasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Forum ini menyepakati bahwa pembangunan dan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di NTT membutuhkan kolaborasi banyak pihak melalui mobilisasi sumber daya, jejaring, koordinasi, dan pemetaan peran pemangku kepentingan.

Selain itu, SMERU dan Rumah Bangsa menyelenggarakan forum pemuda NTT guna mendiskusikan persoalan pemuda di NTT serta peran pemuda dalam pembangunan ekonomi inklusif untuk menurunkan ketimpangan. ■





Delapan studi tentang kesejahteraan anak yang dilakukan SMERU, UNICEF, dan Unisba menempatkan suara anak sebagai pusat analisis. Hasilnya dapat menjadi acuan pemerintah dalam merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak. | Foto: M. Harits Kamaaluddin

Sorotan Kegiatan

Mendengarkan Aspirasi Anak untuk Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Anak yang Lebih Tepat Sasaran

Pada 2022–2023, SMERU, UNICEF, dan Universitas Islam Bandung (Unisba) melakukan delapan studi tentang kesejahteraan anak dengan menggunakan sudut pandang anak di Provinsi Jawa Barat. Temuan studi-studi tersebut diluncurkan dalam acara bertajuk “Atensi Pemerintah Pusat serta Komitmen Pemerintah Jawa Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak secara Holistik”. Acara ini diselenggarakan secara hibrida oleh Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) atas kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, SMERU, dan UNICEF di Bandung pada 10 Agustus 2023.

Pada kesempatan tersebut, Ulfah Alifia, Peneliti Senior SMERU sekaligus ketua tim peneliti studi-studi ini, mempresentasikan hasil penelitian yang berfokus pada anak dan didasarkan pada perspektif anak.



UNICEF mengapresiasi penelitian ini karena anak dilibatkan secara langsung sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan acuan bagi Pemerintah Pusat maupun pemda dalam perencanaan kegiatan yang lebih mempertimbangkan perspektif anak di masa mendatang.

Acara ini turut dihadiri Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, yang mengusulkan pembentukan forum anak oleh pemda untuk mendorong partisipasi anak dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyampaikan pidatonya lewat video yang menegaskan komitmen Provinsi Jawa Barat dalam menjamin kebutuhan tumbuh kembang anak secara holistik melalui sejumlah program.



Anak dengan disabilitas jarang diajak bicara soal hal-hal yang memengaruhi hidup mereka. Salah satu studi kolaboratif ini bertujuan menghadirkan pemahaman lebih utuh tentang situasi mereka. | Foto: M. Harits Kamaaluddin

Acara diseminasi ini berhasil memperkenalkan konsep kesejahteraan subjektif yang melibatkan suara anak dalam perencanaan dan pemantauan hasil pembangunan.

Memahami Kesejahteraan Subjektif Versi Anak

Salah satu temuan studi ini adalah bahwa suara anak, khususnya dari kelompok rentan, sering luput dalam potret kebijakan pemerintah. Agar hasil studi tentang kesejahteraan anak ini menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat dan konsep kesejahteraan subjektif versi anak juga makin dikenal, SMERU memublikasikannya dalam berbagai format: video, poster, dan infografik digital. ■

Akses poster dan infografik:

<https://smeru.or.id/studianak-jabar/webstories/>

Akses video “Pernahkah Kita Mendengarkan Suara Anak dalam Pengambilan Keputusan?”:

<https://www.youtube.com/watch?v=yrCuDztDsyc>



Sorotan Kegiatan

Meningkatkan Kapasitas Pemangku Kepentingan Melalui Pelatihan

Pada 2022, kami membentuk SMERU Learning Centre sebagai sarana untuk mewujudkan salah satu misi SMERU, yaitu mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan berbasis hasil penelitian. Selain meluncurkan dua modul pembelajaran elektronik (*e-learning*) yang dapat diakses di www.slclab.id pada awal tahun, kami juga menyelenggarakan berbagai pelatihan daring terprogram secara reguler (*regular training*) dan pelatihan yang secara khusus disiapkan berdasarkan kebutuhan dan permintaan lembaga lain (*customized training*). Bahan-bahan pelatihan disusun berdasarkan akumulasi pengetahuan

dan pengalaman SMERU yang telah melakukan penelitian kebijakan serta membantu berbagai pihak dalam memanfaatkan hasil penelitian untuk perumusan kebijakan.

Sepanjang 2023, SMERU Learning Centre telah menyelenggarakan delapan pelatihan reguler: dua pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, dua pelatihan Penyusunan Catatan Kebijakan (*Policy Brief*), dan empat pelatihan Pengantar Evaluasi Dampak. Pelatihan Pengantar Evaluasi Dampak yang awalnya direncanakan untuk dilaksanakan dua kali menarik banyak sekali peminat sehingga ditambah menjadi empat kali. Jumlah peserta



Diskusi kelompok mendorong peserta saling bertukar perspektif tentang tantangan dan solusi pengentasan kemiskinan. | Foto: Mukti Mulyana





Peserta pelatihan mendalami isu kemiskinan melalui materi interaktif yang dipandu langsung oleh peneliti utama SMERU. | Foto: Mukti Mulyana

pelatihan reguler pada tahun ini secara keseluruhan adalah 164 orang yang berasal dari lembaga Pemerintah Pusat dan pemda, lembaga pendidikan, asosiasi, organisasi nirlaba, perusahaan pemerintah, dan perusahaan swasta. Karena diselenggarakan secara daring, peserta berasal dari berbagai daerah, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara.

Selain itu, pada tahun ini, SMERU Learning Centre menyelenggarakan *customized training* untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 78 orang. Materi *customized training* untuk BPS dan STIS adalah terkait pengolahan data dan analisis kualitatif. Pelatihan ini bertujuan membantu peserta memahami pengolahan dan analisis data kualitatif yang akan diimplementasikan pada Studi

Kondisi Anak pada Rumah Tangga Miskin Ekstrem 2023. Sementara itu, *customized training* untuk staf Kementerian PPN/Bappenas disesuaikan dengan kebutuhan staf Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.

Tanggapan peserta terhadap pelatihan SMERU Learning Centre sangat positif. Para peserta menyampaikan kepuasannya terhadap materi yang diberikan dalam pelatihan SMERU Learning Centre. Secara khusus, mereka mengapresiasi kegiatan tugas kelompok dan diskusi berbagi pengalaman antarpeserta.

SMERU Learning Centre membuka peluang kerja sama bagi lembaga-lembaga yang membutuhkan pengembangan kapasitas melalui pelatihan dengan topik seputar penelitian dan komunikasi kebijakan. Informasi lebih lengkap dan terkini mengenai kegiatan pelatihan SMERU Learning Centre dapat dilihat pada situs web www.slclab.id serta kanal Instagram @smerulearningcentre. ■

Kontak SMERU Learning Centre



<https://slclab.id/>



[smerulearningcentre](https://www.instagram.com/smerulearningcentre)



+62 812-5285-5028



slclab@smeru.or.id



Sorotan Publikasi

38

Publikasi dan artikel
dari riset SMERU

Tahun ini, SMERU menghasilkan **38 publikasi dan artikel** yang memperkaya diskusi penelitian dan kebijakan. Berikut enam di antaranya yang menyajikan temuan dan wawasan penting yang relevan dengan isu pembangunan terkini.

Catatan Kebijakan

Seri Catatan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif untuk Orang Asli Papua

Nila Warda, Asep Kurniawan, Dyan Widyaningsih, Sylvia Andriani, Dimitri Swasthika Nurshadrina

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kerentanan orang asli Papua (OAP) belum sepenuhnya efektif. Kerentanan OAP, khususnya terkait penghidupan dan risiko sosial, masih tinggi. Rangkaian lima catatan kebijakan ini menekankan pentingnya, antara lain, (i) kerja sama antaraktor dan sinergi multisektor dalam menerapkan perlindungan sosial yang menyeluruh, (ii) pengoptimalan peran pemda dalam upaya pengembangan penghidupan OAP, dan (iii) modifikasi/penyesuaian program bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial untuk mengatasi kerentanan pengungsi.

Mendorong Penyusunan Kebijakan Berbasis Perspektif Anak untuk Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Jawa Barat

Ulfah Alifia, Made Anthony Iswara, R. Ricky Firmansyah

Catatan kebijakan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan perspektif anak dalam melihat kondisi kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan. Kendati sudah ada Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk menyalurkan aspirasinya dalam perumusan kebijakan terkait hak anak, penelitian SMERU menemukan bahwa aspirasi tersebut belum terakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, catatan kebijakan ini merekomendasikan empat strategi penyusunan kebijakan berbasis perspektif anak.

Makalah Posisi

Accelerating Inclusive and Fair Digital Transformation to Anticipate Challenges Facing the Future of Work [Mempercepat Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkeadilan untuk Mengantisipasi Tantangan yang Menghadang Masa Depan Pekerjaan]

Palmira Permata Bachtiar, Jimmy Berlianto, Lia Amelia

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan koneksi internet yang stabil dan berkualitas secara signifikan meski belum merata di luar Jawa dan Bali. Namun, transformasi digital juga perlu memperhatikan keterjangkauan, literasi digital, dan ketersediaan aplikasi ramah pengguna bagi masyarakat yang kurang terlayani. Studi ini menyoroti tata kelola transformasi digital yang belum mampu melayani semua pihak secara adil dan melindungi kelompok rentan, seperti pekerja ekonomi gig.



Catatan Penelitian

Estimating the Effect of a Fuel Price Increase on Poverty and Inequality: Evidence from a Fuel Subsidy Reduction in Indonesia [Mengestimasi Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan: Bukti dari Pengurangan Subsidi BBM di Indonesia]

Ridho Al Izzati, Asri Yusrina, Asep Suryahadi

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada triwulan ketiga 2022 berpotensi meningkatkan inflasi tahunan pada sektor transportasi serta harga barang dan jasa. Catatan penelitian ini menemukan bahwa kenaikan harga BBM tersebut meningkatkan kemiskinan, tetapi hanya sedikit mengurangi ketimpangan pengeluaran. Oleh karena itu, penambahan alokasi bansos dari pemerintah berperan besar dalam memitigasi dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

Artikel Jurnal Akademis

Heterogeneous Impact of Internet Availability on Female Labour Market Outcomes in an Emerging Economy: Evidence from Indonesia [Dampak Heterogenitas Ketersediaan Internet pada Hasil (Outcome) Pasar Tenaga Kerja Perempuan di Negara Ekonomi Berkembang: Bukti dari Indonesia]

Niken Kusumawardhani, Rezanti Pramana, Nurmala Selly Saputri, Daniel Suryadarma

Makalah ini melihat dampak ketersediaan internet terhadap hasil (outcome) pasar tenaga kerja perempuan di Indonesia. Temuannya mengungkap bahwa ketersediaan internet memiliki pengaruh positif, meskipun kecil, terhadap partisipasi angkatan kerja maupun pekerjaan penuh waktu perempuan berusia muda atau yang berpendidikan rendah. Sementara itu, ketersediaan internet justru berpengaruh negatif, walaupun dampaknya juga kecil, terhadap peluang kelompok tersebut mendapatkan pekerjaan yang memerlukan keahlian lebih tinggi serta untuk beralih ke pekerjaan formal.

Bab dalam Buku

Progress and Stagnation in the Livelihood of Informal Workers in an Emerging Economy: Long-term Evidence from Indonesia [Perkembangan dan Stagnansi Penghidupan Pekerja Informal di Negara Ekonomi Berkembang: Bukti Jangka Panjang dari Indonesia]

Mayang Rizky, Daniel Suryadarma, Asep Suryahadi

Bab dalam buku berjudul *The Job Ladder: Transforming Informal Work and Livelihoods in Developing Countries* ini mengemukakan bahwa pekerja yang memulai karier sebagai pekerja informal tingkat rendah cenderung terjebak di posisi tersebut. Namun, jika beralih ke pekerjaan formal, mereka akan memperoleh peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang efektif adalah mendukung peralihan tenaga kerja dari pekerja informal menjadi pekerja formal, meski masih pada tingkat rendah. ■



Keterlibatan dalam Proses Kebijakan

Menyampaikan Informasi Berbasis Bukti kepada Pembuat Kebijakan



Dalam Road to Indonesia Development Forum 2023 di Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan tiga rekomendasi untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan: (i) melibatkan perempuan dan kelompok masyarakat minoritas dalam proses pembangunan, (ii) membuat kebijakan yang inklusif dan dapat menjangkau semua pihak, dan (iii) melestarikan ekosistem pesisir yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk lokal.



Kami memaparkan temuan studi tentang *stunting* dalam pertemuan terbatas dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Paparan ini menjadi masukan dalam perumusan nasihat dan pertimbangan terkait model pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan *stunting* di tingkat nasional, yang kemudian disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.



Dalam dialog kebijakan tingkat tinggi yang diselenggarakan Kementerian Keuangan dan Asian Development Bank, kami memaparkan temuan awal studi tentang efek jangka panjang pandemi COVID-19 terhadap pelaku usaha. Kami menyoroti tiga implikasi kebijakan utama: (i) perlunya dukungan pemerintah agar perusahaan tidak gulung tikar pada awal krisis; (ii) perlunya bantuan bagi perusahaan yang bangkrut agar segera kembali beroperasi; dan (iii) perlunya pemfasilitasian investasi perusahaan dalam mesin dan teknologi guna mempercepat pemulihan.



Kami menyampaikan hasil studi pengembangan profesionalisme guru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Studi ini merekomendasikan pentingnya mengimplementasikan sistem pelatihan yang terdiferensiasi sesuai dengan budaya sekolah yang ada, praktik kepemimpinan, serta kemampuan dan motivasi guru.



Untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, kami menyampaikan rekomendasi kepada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami menekankan bahwa strategi pengelolaan kawasan konservasi perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi guna mengurangi potensi kesenjangan tata kelola. Rekomendasi tersebut didasarkan pada studi mengenai bagaimana pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Memberi Masukan untuk Penyusunan Kebijakan



Dalam diskusi penyusunan draf Peraturan Presiden tentang pendampingan pembangunan, kami menyampaikan dua rekomendasi untuk memperkuat pendampingan pembangunan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas): (i) memfokuskan kerja pendamping pada pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerima manfaat dan (ii) meninjau ulang perhitungan beban kerja efektif dengan menstandarkan cakupan aktivitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pendamping di berbagai wilayah.



Untuk memperkuat kebijakan perlindungan sosial bagi orang asli Papua (OAP), kami menyampaikan rekomendasi kepada dua instansi pemerintah terkait.

- a) **Kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua:** Kami mengusulkan penyusunan pedoman penanganan pengungsi akibat konflik bersenjata, modifikasi program bantuan sosial agar mampu mengatasi kerentanan pengungsi, serta pengoptimalan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan kolaborasi multiaktor.



- b) **Kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:** Kami merekomendasikan penyalarsan program pemda guna menutup celah perlindungan sosial preventif dan protektif dari Pemerintah Pusat, serta pengembangan penghidupan OAP secara transformasional melalui pendekatan inkremental yang responsif terhadap pengungsi akibat konflik.



Dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 bidang perlindungan anak, kami memberi masukan kepada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas. Masukan tersebut menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak secara optimal melalui pendekatan komprehensif, mulai dari tingkat individu dan keluarga hingga masyarakat dan pemerintah.



Dalam diskusi perumusan indikator RPJMN 2025–2029 bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi yang diselenggarakan oleh Direktorat UMKM dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas, kami merekomendasikan empat indikator tambahan: (i) indeks literasi dan inklusi keuangan, (ii) pemanfaatan katalog elektronik dan pasar digital UMKM, (iii) distribusi dan kualitas inkubator dan akselerator, serta (iv) jaminan sosial ketenagakerjaan bagi UMKM dan pekerja gig.



Dalam rapat penyusunan model *proxy mean test* untuk hasil pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), kami menyampaikan masukan tentang indikator kemiskinan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Kami menjelaskan karakteristik kemiskinan

perkotaan dan perdesaan berdasarkan kajian kualitatif dan kuantitatif SMERU. Masukan tersebut akan digunakan BPS untuk menguatkan pemodelan pemeringkatan data Regsosek guna meningkatkan akurasi peringkat kesejahteraan.



Dalam diskusi evaluasi pelaksanaan Dana Desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2024, kami memaparkan hasil sejumlah studi kepada Direktorat Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas. Kami merekomendasikan pendampingan dan pemfasilitasan bagi aparat desa agar mampu mengatasi permasalahan, mengembangkan potensi, serta memperkuat kapasitas pemangku kepentingan desa dalam pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan.

Membangun Konsensus di Antara Para Pemangku Kepentingan



Kami memaparkan temuan dari delapan studi tentang anak Indonesia kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Setelah mendengarkan paparan tersebut, KPPPA sepakat untuk bekerja sama dengan SMERU, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan UNICEF untuk menyelenggarakan peluncuran hasil studi di Bandung pada Agustus 2023.

Memengaruhi Kebijakan/Peraturan



Dua pemerintah desa mengadopsi sebagian tahapan dari panduan penargetan penerima bantuan langsung tunai Dana Desa yang disusun SMERU. Desa pertama berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan desa kedua di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Khusus di Gresik, panduan tersebut bahkan telah dilembagakan melalui Peraturan Kepala Desa. ■

Jejaring

Lembaga Donor

Sepanjang 2023, SMERU mengerjakan 36 proyek penelitian dengan dukungan lembaga donor dari berbagai sektor. Kerja sama ini menghasilkan pengetahuan dan bukti yang berharga untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti.

PT Amman Mineral Nusa Tenggara

ABC International Development

Agence Française de Développement (AFD)

Asian Development Bank

PT Bank BCA

BASAbali Foundation

Blavatnik School of Government, University of Oxford

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

ECLT Foundation

Food and Agriculture Organization (FAO)

Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia (KONEKSI)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kurawal Foundation

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh Sejahtera (MAHKOTA) - The Australian Government's DFAT

PT Gojek Indonesia

PT Tokopedia

Tanoto Foundation

Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan (TKSP3)-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)

UNICEF

United Nations Population Fund (UNFPA)

World Bank

World Health Organization (WHO)

Yayasan Save the Children Indonesia

Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB)

Pelatihan/Peningkatan Kapasitas

Sejumlah lembaga telah menjadi mitra SMERU dalam pemagangan (melalui program Kampus Merdeka) dan peningkatan kapasitas (melalui SMERU Learning Centre). Kerja sama ini turut memperluas jangkauan manfaat riset-riset SMERU bagi masyarakat luas.

Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies (ACICIS)

Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan-Kementerian PPN/Bappenas

Badan Pusat Statistik-Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

Mitra Pendidikan Indonesia (MPI)

Universitas Airlangga

Universitas Gadjah Mada

Universitas Padjajaran



Kerja Sama Proyek Nonpenelitian

Selain mengerjakan proyek penelitian, SMERU juga menjalin kerja sama penelitian nonproyek (kemitraan yang berfokus pada penyebaran pengetahuan melalui seminar, diskusi, dan kegiatan publik lainnya) dengan sejumlah lembaga. Langkah ini membantu menyebarkan hasil penelitian dan memperkuat advokasi kebijakan berbasis bukti.

ANU Indonesia Project

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rumah Kebangsaan

PT Tokopedia

Jaringan

Bergabung dalam jaringan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak serta memungkinkan SMERU untuk menyebarkan hasil penelitian dan advokasi ke khalayak yang lebih luas.

ASEAN+3 Finance Think-tank Network

Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture (PAACLA) Indonesia

Perhimpunan Filantropi Indonesia

Pokja 5 *Community of Practice* Lembaga Riset Independen



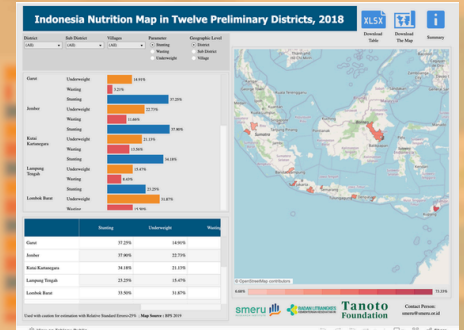
SMERU bekerja sama dengan Tokopedia menyelenggarakan seminar Forum Kajian Pembangunan seri 4 yang mengangkat tema "Bangkit dan Berjuang: Potret Kondisi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia".
Foto: M. Harits Kamaaluddin



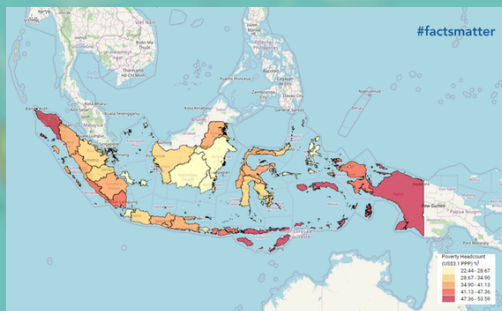
Data & Informasi

Peta Status Gizi Indonesia

Peta Status Gizi di Indonesia menyajikan estimasi status gizi anak bawah lima tahun (balita) di tingkat desa dan kecamatan di enam kabupaten yang termasuk dalam wilayah prioritas penanganan *stunting*. Dibatasi dengan menggunakan metode estimasi wilayah kecil (*small area estimation/SAE*), peta ini bertujuan membantu menentukan desa prioritas dalam penanganan *stunting*.



smeru.or.id/en/nutritionmap



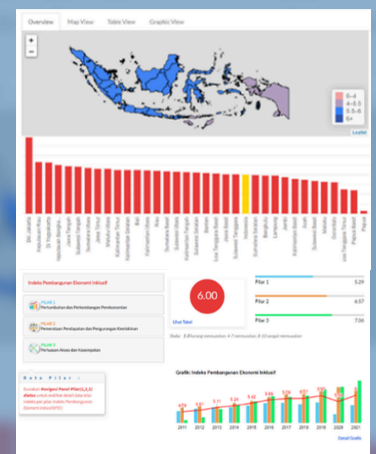
povertymap.smeru.or.id

Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia

Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015 memuat estimasi angka kemiskinan dan berbagai indikator penghidupan masyarakat di **6.599 kecamatan** dan **75.267 desa/kelurahan** berdasarkan batas-batas administratif pada 2010. Peta ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan desa/kelurahan prioritas dalam penanggulangan kemiskinan serta riset-riset terkait kemiskinan dari berbagai dimensi.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

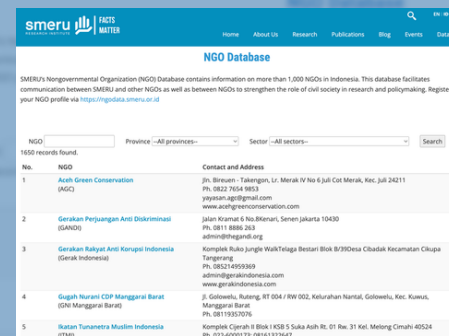
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) menyajikan tingkat keinklusan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Indeks yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bersama SMERU ini dapat digunakan untuk mengukur dan memantau tingkat keinklusan pembangunan di Indonesia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.



Data & Informasi

Pangkalan Data Ornop

Pangkalan Data Organisasi Nonpemerintah (Ornop) berisi data ornop tingkat nasional dan daerah yang paling lengkap di Indonesia. Selain digunakan oleh SMERU untuk menyebarkan publikasi dan informasi tentang kegiatan dan hasil penelitian SMERU, pangkalan data ini digunakan oleh SMERU dan lembaga-lembaga lain untuk mengidentifikasi keberadaan ornop di berbagai bidang dan lokasi. Hingga akhir 2022, terdapat **1.649 data ornop** yang tersimpan dalam pangkalan data kami.



No.	NGO	Contact and Address
1	Arah Green Conservation (AGC)	Jln. Boreah - Tabangan, Lt. Merak IV No 6 Juli Cak Merak, Kec. Juli 24211 Ph. 0822 7654 9853 ayman.ah@gmail.com www.agreenconservation.com
2	Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GPAK)	Jalan Kramat 6 No. Binar, Senen Jakarta 10430 Ph. 0811 888 243 admin@hagandi.org
3	Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Gerak Indonesia)	Kampung Ruko Jungle WarkTiga Bestari Blok B/30Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Tangerang Ph. 025214555533 admin@gerakindonesia.com www.gerakindonesia.com
4	Gugih Nurani CDP Manggarai Barat (GNI Manggarai Barat)	Jl. Gelawes, Rukung RT 004 / RW 002, Kelurahan Hantak, Gelawes, Kec. Kawan, Manggarai Barat Ph. 0811952076
5	Ikatan Tuntutan Muslim Indonesia (ITMI)	Komplek Ciprasi 9 Blok 1K5B 5 Suka Asih Rt. 01 No. 31 Kel. Melong Cimahi 40524 Ph. 022-6000173; 08161322647

smeru.or.id/en/ngo-database

RISE

RESEARCH ON IMPROVING
SYSTEMS OF EDUCATION

rise.smeru.or.id

Program RISE di Indonesia

Program Research on Improving Systems of Education (RISE) di Indonesia dikelola dan dipimpin SMERU. Program ini merupakan bagian dari Program RISE global yang mendukung peningkatan pembelajaran siswa di seluruh dunia. Program RISE dilaksanakan di tujuh negara: Ethiopia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Tanzania, dan Vietnam. Program RISE di Indonesia melakukan penelitian longitudinal yang mengkaji reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah.



Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat menangkap suara, nuansa, dan perspektif yang tak terlihat di data statistik. | Foto: M. Harits Kamaaluddin

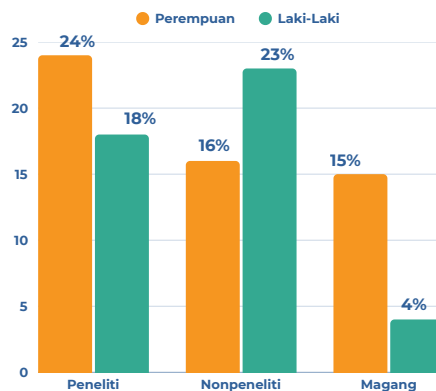
Profil Staf

Komposisi Staf berdasarkan Gender

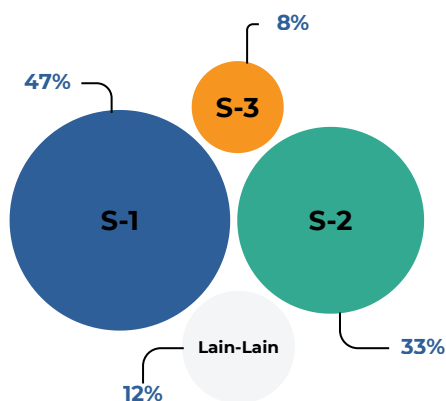


56% Perempuan
44% Laki-Laki

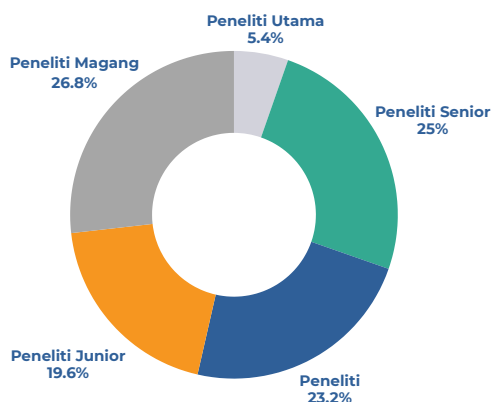
Komposisi Peneliti, Nonpeneliti, dan Magang berdasarkan Gender



Komposisi Staf berdasarkan Pendidikan



Komposisi Peneliti berdasarkan Status Kepangkatan



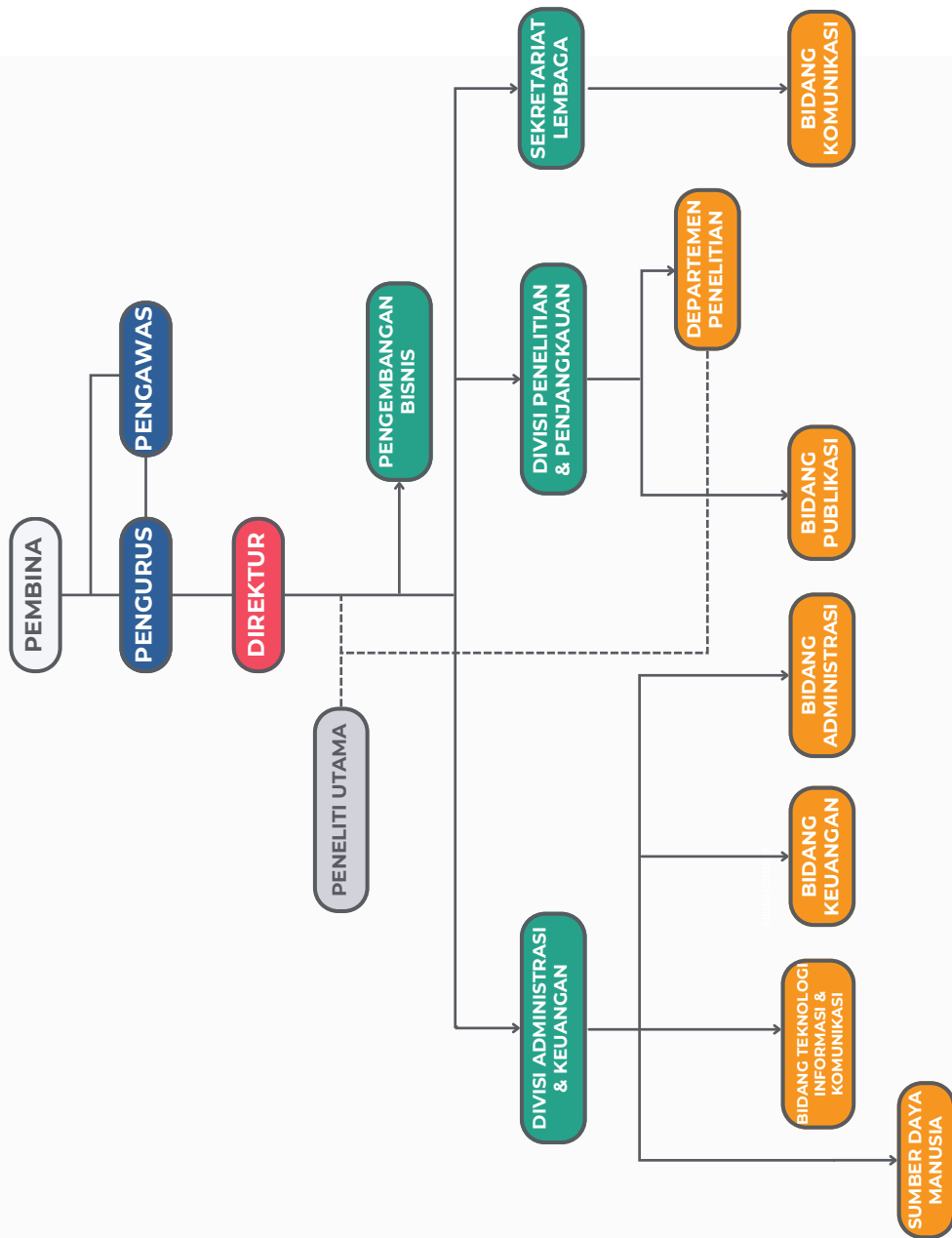
Sebaran Peneliti Lokal dan Enumerator berdasarkan Domisili



Keluarga Besar The SMERU Research Institute



Struktur Organisasi



YAYASAN SMERU

Laporan Kegiatan & Perubahan Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

	2023 (Unaudited)			2022 (Unaudited)	
	Terikat Temporer	Tidak Terikat	Terikat Permanen	Jumlah	Jumlah
Penerimaan					
Penerimaan dari donor	17.051.597.142	-	-	17.051.597.142	31.109.816.956
Penerimaan dari lain-lain	-	-	-	-	1.371.886.173
Jumlah penerimaan	17.051.597.142	-	-	17.051.598.142	32.481.703.129
Pengeluaran					
Beban program	26.968.712.991	-	-	26.968.712.991	38.867.948.270
Beban operasional	-	1.152.690.012	-	1.152.690.012	1.714.005.610
Beban penyusutan	-	237.112.019	-	237.112.019	360.556.326
Beban lain-lain	-	-	-	-	-
Jumlah pengeluaran	26.968.712.991	1.389.802.031	-	28.358.515.022	40.942.510.206
Kenaikan (penurunan)					
Aset bersih	(9.917.115.849)	(1.389.802.031)	-	(11.306.917.880)	(8.460.807.077)
Aset neto awal tahun	47.179.503.970	(33.239.222.465)	118.585.503	14.058.867.008	22.519.674.086
Koreksi aset neto awal tahun (untuk belum dimasukkan jumlah biaya cadangan employment benefit tahun lalu 2020-2021)					
Aset bersih akhir tahun	37.262.388.121	(34.629.024.496)	118.585.503	2.751.949.128	14.058.867.009



Laporan Arus Kas

per 31 Desember 2023 dan 2022

	2023 (Unaudited)	2022 (Unaudited)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Perubahan aset bersih	(11.306.917.880)	(8.460.807.077)
Koreksi aset bersih tahun lalu		(87.513.764)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi kelebihan penerimaan atas pengeluaran pada kas bersih diperoleh dari aktivitas		
Penyusutan	237.112.019	360.556.326
Laba/rugi yang belum direalisasi atas investasi	-	-
Penurunan (peningkatan) pada:		
Uang muka	1.088.380.907	(366.080.786)
Piutang	156.870.000	1.627.393.114
Biaya dibayar di muka	473.394.475	(348.579.475)
Utang pajak	16.596.978	(445.567.750)
Biaya yang masih harus dibayar		-
Utang donor	-	-
Utang lain-lain	-	-
Kewajiban imbalan kerja	(714.306.700)	243.250.000
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(10.048.870.201)	(7.477.349.412)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penjualan investasi	5.089.031.347	5.490.905.622
Penempatan pada investasi	-	-
Perolehan aset tetap dan inventory	(129.165.832)	(176.280.300)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	4.959.865.515	5.314.625.322
Kenaikan/(penurunan) bersih kas Kas dan setara kas, awal	(5.089.004.686)	(2.162.724.090)
Koreksi	6.219.309.329	8.382.033.419
	-	-
Kas dan setara kas, akhir	1.130.304.643	6.219.309.329



Laporan Posisi Keuangan

per 31 Desember 2023 dan 2022

	2023 (Unaudited)	2022 (Unaudited)
ASET		
Aset lancar		
Kas dan setara kas	1.130.304.643	5.061.001.904
Investasi jangka pendek	-	5.089.031.347
Uang muka	250.370.000	1.338.750.907
Piutang lain-lain	23.130.000	180.000.000
Biaya dibayar di muka	-	473.294.475
Jumlah aset lancar	1.403.804.643	12.142.178.633
Aset tidak lancar		
Aset tetap - bersih	8.129.265.285	8.000.099.453
Jumlah aset tidak lancar	8.129.265.285	8.000.099.453
Jumlah aset	9.533.069.928	20.142.278.086

	2023 (Unaudited)	2022 (Unaudited)
LIABILITAS DAN ASET BERSIH		
Liabilitas jangka panjang		
Utang pajak	154.814.100	171.411.078
Kewajiban imbalan kerja	6.626.306.700	5.912.000.000
Jumlah kewajiban	6.781.120.800	6.083.411.078
Aset Bersih		
Tidak terikat	(34.629.024.496)	(33.239.222.465)
Terikat temporer	37.380.973.624	47.179.503.970
Jumlah aset bersih	2.751.949.128	14.058.867.008
Jumlah kewajiban dan aset bersih	9.533.069.928	20.142.278.086





Tahun ini, SMERU mulai meneliti isu perubahan iklim untuk menyoroti dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan yang selama ini kurang mendapat perhatian. | Foto: Novita Eka Syaputri

PENGARAH

Widjajanti Isdijoso

DEWAN REDAKSI

Heni Kurniasih

Ulfah Alifia

TIM PENYUSUN

Koordinator

Alia An Nadhiva

Kontributor

Ana Rosidha Tamyis

Annabel Noor Asyah

Asep Kurniawan

Hesti Marsono

Made Anthony Iswara

Michelle Andrina

Nadya Novitri

Nina Toyamah

Nurmala Selly Saputri

Palmira Permata Bachtiar

Ratri Indah Septiana

Rini Kusnadi

Ruhmaniyati

Sylvia Andriyani

Kusumandari

Ulfah Alifia

Wiwin Purbaningrum

Yudi Suwarna

Editor

Alia An Nadhiva

Mohammad Gabriell

Firdausy Erfan

Desainer Grafis

Alia An Nadhiva

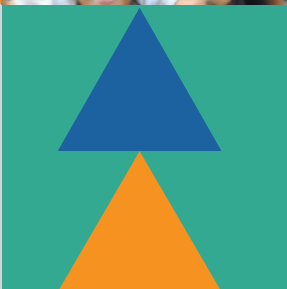
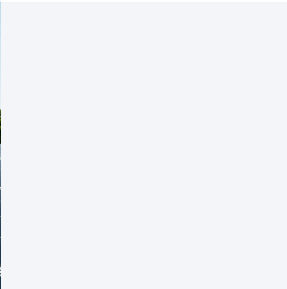
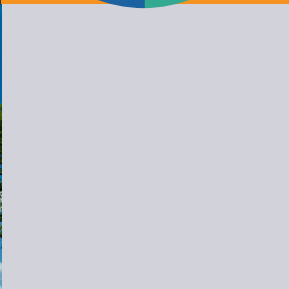
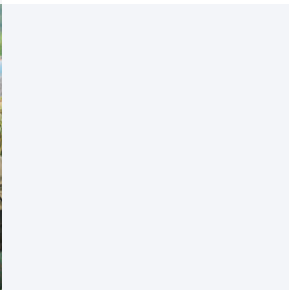
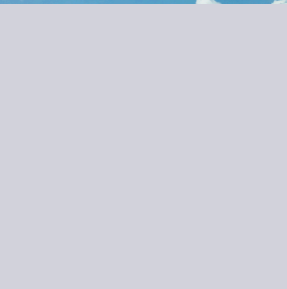
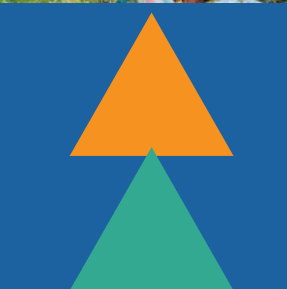
Annabel Noor Asyah

M. Harits Kamaaluddin

Foto Sampul Depan dan Belakang

canva.com





Jl. Cikini Raya No. 10A,
Jakarta 10330, Indonesia



+6221 3193 6336;
+6221 3193 0850 (fax)



smeru@smeru.or.id



smeru.or.id

